

Pergolakan Mesir: Dari Revolusi ke Transisi Demokrasi

Herdi Sahrasad

Peneliti senior Pusat studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, dan Dosen ilmu sosial-politik Universitas Paramadina, Jakarta

Abstract: *The 2011 revolution in Egypt started with marches, demonstrations and civil resistance on January 25. Protesters were inspired by the successful uprising in Tunisia, where demonstrators succeeded in bringing down the government. People came on to the streets demanding the overthrow of Egyptian President Hosni Mubarak. They complained of poverty, unemployment, corruption and autocratic governance of the president who had ruled the country for 30 years. Demonstrators included Islamic, liberal, anti-capitalist, nationalist and feminist elements. The Egyptian protesters' grievances focused on legal and political issues, including police brutality, state-of-emergency laws, lack of free elections and freedom of speech, corruption, and economic issues including high unemployment, food-price inflation and low wages. The protesters' primary demands were the end of the Mubarak regime and emergency law, freedom, justice, a responsive non-military government and a voice in managing Egypt's resources. Strikes by labour unions added to the pressure on government officials.*

Kata Kunci: *Mesir; revolusi; demokrasi*

Pendahuluan

Neoliberalisme ekonomi, despotisme, kemiskinan dan korupsi kronis serta kediktatoran dan kenaikan harga pangan, merupakan faktor-faktor yang mencetuskan revolusi paling dramatis abad ini.¹

Mesir, Jordan, Maroko, Tunis melakukan privatisasi BUMN, mendorong masuk modal asing, memotong subsidi, anggaran belanja negara untuk publik, menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan dan kehidupan rakyat miskin makin sulit, sementara kelas atas (upper class) menikmati buah neoliberalisme, dan kelompok paling siap adalah profesional dan kalangan dunia usaha. Neoliberalisme menguntungkan kelas atas dan kelas menengah yang masih tipis lapisannya, sementara mayoritas rakyat makin miskin dan sulit.

Para akademisi "Middle East Studies" untuk sebagian telah kehilangan kemampuan analisis atas efek destabilisasi dari kebijakan ekonomi neoliberal yang memiskinkan rakyat Dunia Arab.

Gregory Gause juga tak mengira militer yang selama ini melayani dengan setia elite istana, ternyata kemudian memilih memisahkan diri dan mendukung gerakan kebebasan anti rezim di kalangan pemuda. Menurutnya, peran militer di Timur Tengah juga harus dikaji ulang mengingat profesionalisme dan institusionalisme militer sudah berubah.

Gregory Gause mendorong para pakar Timur Tengah harus studi ulang mengenai pentingnya identitas Arab dalam memahami masa depan politik Timteng. Jatuhnya Ben Ali

¹Lisa Anderson, "Demystifying Arab Spring", Foreign Affairs (edisi Mei-Juni 2011) Tulisan ini merupakan revisi atas berbagai artikel penulis yang bertebaran di www.inilah.com dan www.rimanews.com sepanjang Januari-Desember 2011.

dan Mubarak meyakinkan masyarakat Arab di negeri tetangganya bahwa mereka juga melakukan hal yang sama di negeri mereka .

Wael Ghonim adalah tipikal elite yang memihak kaum miskin di Mesir/Arab. Wael Ghonim, eksekutif muda di Google Mesir, dengan berani mengambil resiko mempertaruhkan nyawa untuk mengorganisasi kaum muda dan masyarakat dengan seruan “We are all Khaled Said !” di Facebook untuk mengenang seorang pemuda yakni Khaled Said, yang tewas digebuki polisi

Karena itulah Timur Tengah berubah. Gerakan revolusi menimbulkan perubahan rezim (regim change). Menyusul jatuhnya rezim Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, serta penangkapan dan pembunuhan mantan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, demonstrasi yang menggusur dan menggulingkan rezim opresif Ali Abdullah Saleh di Yaman serta demonstrasi mendesak mundur rezim Bashar Al-Assad di Suriah, mengindikasikan pergolakan di Dunia Arab terjadi oleh banyak sebab. Tidak ada sebab yang tunggal dalam Arab Spring.

Revolusi yang mengguncang dunia Arab dalam setahun terakhir itu berawal dari gerakan solidaritas rakyat Tunisia atas aksi bakar diri seorang penjual sayur-mayur bernama Muhammed Bouazizi. Gerakan ini dimulai pada 18 Desember 2010 dan berhasil melengserkan rezim Ben Ali pada 14 Januari 2011. Dari Tunisia, revolusi dunia Arab kemudian menyebar ke negara Arab lain dan berjaya mendongkel pemerintahan otoriter di Mesir dan Libya. Bahkan, bara revolusi terus berkobar hingga sekarang di Yaman, dan Suriah

Perubahan rezim hanyalah langkah pertama menuju penggantian dasar-dasar yang mendukung rezim sebelumnya. Berapa lama dan bagaimana radikalnya dasar-dasar ini diubah, adalah tergantung pada kekuatan dan kejelasan dari para pemimpin gerakan revolusioner, yang sering kali terdiri dari elemen berbeda yang menyatu untuk mencapai tujuan bersama mengubah status quo.

Ketika Presiden otoriter Tunisia Zine al Abidine Ben Ali lengser setelah hanya empat minggu protes damai telah memicu pemberontakan massal terhadap rekan Mesirnya, Mubarak, dunia terkejut. Harapan muncul di ibukota-ibukota Barat bahwa gelombang- gelombang tuntutan populer untuk demokrasi akan menyapu wilayah tersebut. Namun, sementara keuntungan-keuntungan dari konsolidasi Tunisia dan Mesir masih dibuat, gelombang demokrasi telah mencapai Suriah dan Yaman; sementara perang saudara di Libya akhirnya mampu mengakhiri rezim Moammar Khadafy.

Apa yang menyebabkan keretakan radikal di sejarah wilayah ini adalah hilangnya rasa takut warga terhadap pasukan keamanan, yang tercapai dengan mengumpulkan sejumlah besar orang di berbagai daerah. Orang-orang yang Sholat Jumat di kawasan Arab itu terus didorong untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Tidak ada pemerintahan Arab yang berani melarang laki-laki Muslim untuk bersama-sama melakukan Sholat Jumat sesuai dengan Al-Quran.

Peristiwa bakar diri Muhammad Bouazizi, pengangguran lulusan ilmu komputer di kota Tunisia, Sidi Bouzid, terjadi pada Jumat, 17 Desember 2010, telah lebih banyak menarik perhatian daripada jika terjadi pada hari-hari biasa. Pada hari Jumat empat minggu kemudian, perkelahian antar demonstran, mengalir keluar dari masjid setelah Sholat mingguan, dan terjadi sangat banyak pertumpahan dari pasukan keamanan sehingga Ben Ali terpaksa melarikan diri.

Di Mesir kerumunan demonstran tumbuh secara esensial pada 25-28 Januari 2011, dengan para pemimpin oposisi menyatakan Jumat 28 Januari 2011 itu sebagai “Hari Kejatuhan” Mubarak, yang kemudian lengser seminggu kemudian.

Yang harus digarisbawahi, satu dekade setelah tragedi 9/11/2001, Arab Spring meletus, kaum muda di Tunisia dan Mesir meruntuhkan diktator yang ditakuti. Dan di Libya, revolusi rakyat dilakukan dengan bantuan kekuatan Barat. Dalam pembantaian di Suriah, kemarahan tidak diarahkan terhadap setan-setan asing, tetapi kemarahan rakyat melawan penguasa kejam yang telah merampok kesempatan untuk hidup layak bagi rakyat banyak.

Di luar konteks Arab Spring, sebagian orang-orang Arab secara politik sadar untuk menerima tanggung jawab atas apa yang telah terjadi pada 9/11/2001. Namun mereka juga meyakini dan tenggelam dalam konspirasi yang menduga kuat bahwa serangan WTC 9/11/2001 ini adalah karya Amerika sendiri, bahwa ribuan orang Yahudi tidak muncul di tempat kerja di Menara Kembar pada 9/11/2011, dan yang tewas justru orang Kristen dan Islam.

Dinamika Mesir

Kaum pekerja di Mesir merupakan salah satu kelompok pro-revolusi yang menjatuhkan Mubarak. Para pekerja bukanlah kelas menengah, mereka mencakup tenaga berkeahlian dan buruh yang tak berketrampilan. Berbicara tentang kelas buruh bukanlah hal tabu di Mesir. Gaji bulanan buruh tekstil Mesir secara tipikal, dan banyak pekerja hanya meraih 2 dolar per hari, dan mereka itu hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut World Bank, 44 persen rakyat Mesir hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga Revolusi Nil adalah revolusi oleh kaum miskin. Pendidikan bagi keluarga pekerja juga buruk karena sistem pendidikan/ sistem sekolah tidak berjalan baik, sehingga setiap orang mengangkat tutor untuk anak-anak mereka. Akibatnya banyak orang berhutang untuk menanggung kebutuhan pokok keluarga mereka. Sementara itu harga pangan terus meroket selama beberapa bulan selama 2010-2011, menjadi problem ekonomiyang akut selama 20 tahun terakhir era Mubarak.5 Situasi ini menjadi bahan bakar Revolusi Nil yang digerakkan kaum muda, didukung kaum pekerja, para aktivis perempuan dan masyarakat sipil yang marah atas korupsi, kediktatoran dan penindasan.

Di Mesir, di mana revolusi kemudian menang, para aktivis pro-demokrasi sejak awal menyadari bahwa adalah naif untuk menerima komitmen bagi keadilan sosial, kebebasan sipil, dan demokrasi dari Dewan Militer yang dipimpin oleh Marsekal Mohammed Hussein Tantawi, menteri pertahanan Mubarak selama 20 tahun.

Ketika kaum muda berdemo dan bergolak, Deklarasi Dewan Militer Januari 2011 sepertinya diarahkan sebanyak mungkin untuk menenangkan dukungan Amerika Serikat, sumber bantuan tahunan dari \$ 2 miliar dan persenjataan canggih bagi Mesir. Para demonstran di Lapangan Tahrir Kairo jalan terus dengan ide revolusi. Hal ini makin membesar dengan isu rencana Hosni Mubarak untuk menurunkan kekuasaan pada anaknya, yang juga disikapi kritis oleh militer Mesir. Dewan Militer memiliki kepentingan untuk meles-tarikan sebanyak mungkin struktur politik-ekonomi era Mubarak. Di bawah pengawasan Presiden Anwar Sadat dan Mubarak, pihak militer

memperoleh peternakan, pabrik, dan hotel-hotel. Perkiraan aset mereka bervariasi dari 10 sampai 30 persen dari perekonomian nasional.⁶

Selama demonstrasi revolusioner itu, para pemuda terus berhadapan dengan rezim Mubarak yang bertahan dan menghadapi Dewan Militer yang menolak tekanan untuk mengadili para pejabat sipil dan militer rezim Mubarak yang dituduh korupsi dan melakukan pembunuhan terhadap para demonstran damai yang terus mendesak Mubarak mundur.

Namun slogan dan pamlet yang telah dibawa kaum muda ke jalan-jalan di Kairo telah secara massif dan cepat menargetkan Dewan Militer untuk dilumpuhkan. Para demonstran diserang polisi berkuda dan ditembak oleh preman-preman pro-militer yang juga memegang pisau, pedang dan bom molotov. Militer berusaha menetapkan keputusan melarang demonstrasi.

Pasukan bersenjata menembaki ke udara untuk membubarkan aksi duduk selama tiga minggu para demonstran damai. Namun aksi massa untuk revolusi jalan terus, meski Dewan Militer punya agenda licik dan mengadu domba satu kelompok politik dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya Mubarak menyerah dan mundur setelah para jenderal mendukung gerakan revolusi pemuda yang berfokus pada kebebasan dan demokrasi serta keadilan.

Kalau kita periksa, protes di Mesir mulai pada tanggal 25 Januari 2011 dan berjalan selama 18 hari. Dimulai sekitar tengah malam pada 28 Januari 2011, pemerintah Mesir berusaha, agak berhasil, untuk menghilangkan akses internet bangsa, untuk menghambat kemampuan demonstran untuk berkoordinasi melalui media sosial. Kemudian pada hari itu, saat puluhan ribu demonstran memenuhi jalan-jalan kota besar Mesir, Presiden Mubarak membubarkan pemerintahannya, kemudian menunjuk kabinet baru. Mubarak juga menunjuk Wakil Presiden pertama dalam hampir 30 tahun.

Pada tanggal 10 Februari 2011, Mubarak menyerahkan se-mua kekuasaan presiden kepada Wakil Presiden Omar Suleiman, tetapi segera setelah itu mengumumkan bahwa ia akan tetap sebagai Presiden sampai akhir masa jabatannya. Namun, protes berlanjut terus pada hari berikutnya, dan Suleiman cepat mengumumkan bahwa Mubarak memilih mengundurkan diri dari kursi kepresidenan dan mentransfer kekuasaan kepada Angkatan Bersenjata Mesir. Militer segera membubarkan Parlemen Mesir, menunda Kons-titusi Mesir, dan berjanji untuk mencabut “hukum darurat” yang telah berusia tiga puluh tahun. Dalam kaitan ini, A, Essam Sharaf, tokoh sipil, diangkat sebagai Perdana Menteri Mesir pada tanggal 4 Maret 2011 sampai adanya persetujuan luas dari kalangan orang Mesir yang melakukan protes di Alun-alun Tahrir. Protes terus berlangsung sampai akhir 2011. Bagaimanapun, dalam menanggapi Sharaf dan Dewan Agung Angkatan Bersenjata, merasakan kelesuan dalam melembagakan reformasi sehingga protes di Alun-alun Tahrir pun dilakukan kembali, bahkan setelah tiga putaran pemilu yang dimenangkan oleh Partai Kebebasan dan Keadilan (sayap Ikhwanul Muslimin) dan partai kaum Salafi bernama an-Nur. Tentu saja jalan terjal dan berduri memenuhi prosesi menuju perubahan di negeri piramida ini.⁷

Para pemuda, yang memprakarsai protes jalanan sekuler menyadari kesenjangan besar yang ada antara keberhasilan mereka dalam mengumpul massa dan mendirikan partai-partai politik, namun kandas dalam soal jaringan dan basis massa secara nasional untuk mengimbangi Ikhwanul Muslimin yang didirikan pada tahun 1928 oleh Hassan Al-Banna. Ikhwanul telah dan terus membangun dan mempertahankan akar yang mendalam di masyarakat, meskipun dalam jangka waktu lama mengalami tekanan.

Para pemimpin Ikhwanul telah memutuskan untuk memperebutkan kurang lebih 50 persen dari kursi parlemen saat pemilihan umum diadakan. Dan Ikhwanul terbukti menang.

Maka kini ujian dari sistem demokrasi yang dibangun kaum revolusioner Mesir adalah mendorong sikap tunduk militer kepada otoritas sipil yang terpilih. Para politisi dari semua lapisan menghadapi perjuangan panjang di depan untuk mencapai tujuan tersebut. Para pemuda revolusioner meyakini bahwa menggulingkan para diktator adalah lebih mungkin dan menjadi bagian mudah dari sebuah perjuangan panjang untuk menegakkan demokrasi substansial.

Ihwal Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin (IM) memimpin oposisi publik terhadap Partai Demokratik Nasional pimpinan Presiden Hosni Mubarak, yang telah berkuasa sejak 1981.

Sejak awal gerakan reformasi Kairo, Ikhwanul Muslimin telah menuntut Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri. IM meyakinkan puluhan ribu pengunjuk rasa di seluruh negeri Mesir turun ke jalan dalam pekan-pekan terakhir sebelum Mubarak tumbang.

Kelompok Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya enggan menampakkan diri, mulai unjuk gigi dan mencari kolaborasi dengan tokoh oposisi Mohammed Elbaradei. “Seluruh elemen pemerintahan termasuk presiden, partai dan anggota parlemennya harus membubarkan diri,” demikian pernyataan Ikhwanul Muslimin waktu itu.

Sejak protes dimulai 25 Januari 2011 di Mesir, tercatat ratusan orang tewas. Umumnya korban tewas akibat bentrokan antara pengunjuk rasa dan pihak kepolisian. Aksi kekerasan sebelumnya juga sempat berlangsung di Suez, Alexandria dan kota-kota besar lainnya.

Pihak berwenang Mesir menutup internet dan layanan ponsel di negara itu sejak pekan lalu dan memberlakukan jam malam di kota-kota besar. Para aktivis IM dari kalangan mahasiswa dan kelas menengah umumnya mahir menggunakan internet dan media elektronik lainnya.

IM sempat mengajukan kandidat Mohamed ElBaradei sebagai calon pengganti Mubarak. Mantan kepala International Atomic Energy Agency (IAEA) berusia 68 tahun ini kembali ke Mesir pada 2010 setelah perjalanan karirnya yang berhasil mengantarkannya meraih Hadiah Nobel bidang perdamaian pada 2005. Sebagai seorang pengacara, ia memilih terjun ke dunia politik karena menganggap Mesir membutuhkan perubahan total. Pria ini juga dengan tegas meminta Presiden Hosni Mubarak turun untuk mengakhiri otoritas militer. El-Baradei memperoleh dukungan IM karena dianggap paling kredibel dan kapabel.

Ikhwanul Muslimin Mesir adalah organisasi Islam tertua dan terbesar di negara itu, yang didirikan oleh Hassan al-Banna pada 1920. Kelompok ini telah mempengaruhi gerakan-gerakan Islam di seluruh dunia dengan model aktivisme dan intelektualisme politik yang dikombinasikan dengan kegiatan amal saleh Islam.

Gerakan ini awalnya ditujukan hanya untuk menyebarkan moral Islam dan kebajikan serta kesalehan, tetapi kemudian terlibat dalam politik, khususnya berjuang untuk menyingkirkan kontrol kolonial Inggris di Mesir dan membersihkan semua pengaruh Barat di negeri Fir’aun itu.

Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip demokratis. Slogan mereka yang paling terkenal, digunakan di seluruh dunia, adalah: “Islam

adalah solusi”. Pada akhir 1940-AN, kelompok ini diyakini memiliki sebanyak dua juta pengikut di Mesir. Dan pada periode yang sama ide-idenya telah menyebar di seluruh dunia Arab. Al-Banna juga menciptakan sayap paramiliter, Special Apparatus, yang bergabung dengan perang melawan pemerintahan Inggris.

Pemerintah Mesir membubarkan kelompok Ikhwan tersebut pada tahun 1948- an karena dianggap menyerang kepentingan Inggris dan Yahudi. Segera setelah itu, kelompok itu dituduh membunuh Perdana Menteri Mahmoud Al- Nuqrashi.

Kali ini IM yang tak dikehendaki AS/Barat itu, mampu mendesak perubahan di Mesir, yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan Israel maupun AS/Barat. Menlu AS Hillary Clinton terang-terangan menegaskan AS tak meng-hendaki IM dan Islam radikal lainnya berkuasa di Mesir.

Karena itu, dengan kecerdasan dan kecakapan politik, IM berusaha meyakinkan AS/Barat dan Israel bahwa jika kelak mereka berkuasa pasca Mubarak atau menang dalam pemi-lu mendatang, hal itu sah dan harus dihormati AS/Barat dan Israel sebagai konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri.

Bukankah menang kalah dalam demokrasi itu biasa saja? Ataukah memang AS/Barat dan Israel paranoid dan phobia terhadap Islam politik yang diusung Ikhwanul Muslimin? Mungkin proses perubahan di Mesir kelak menyediakan jawabannya.

Sumber Pergolakan

Sumber pergolakan di Mesir sejak era Mubarak adalah dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terus berhimpitan sampai saat ini.

Menurut Tarek Osman, jelang pemilu Mesir secara khusus, ada lima arus yang akan menentukan wajah sosial-politik Mesir ke depan - sebuah struktur kelas berubah, penurunan legitimasi rezim, erosi lembaga, tidak adanya narasi nasional yang berarti dan pergeseran demografis yang dramatis – kesemua- nya mengalir melalui celah-celah masyarakat Mesir yang menyusun “panggung” bagi ledakan pasca pemilu.

Faktor pertama adalah transformasi dalam komposisi kelas menengah di negara itu. Kelompok sektor publik seperti buruh/karyawan, profesional, pejabat militer dan pemilik usaha kecil dan menengah bersatu pada 1950-an dan 1960-an.

Namun pada pertengahan 1970-AN, di bawah kebijakan pintu terbuka (infitah) Presiden Anwar Sadat, kelas menengah mengalami rekonfigurasi setelah sektor-sektor baru muncul, yakni para pedagang, pialang, karyawan perusahaan multinasional, dan adanya 3 juta orang - plus orang Mesir yang beremigrasi ke Teluk untuk mencari pekerjaan selama bonanza minyak 1970- an. Selain itu, penarikan bertahap dan konsisten oleh negara untuk tidak lagi menye-diakan pendidikan, kesehatan, transportasi dan layanan penting lainnya secara memadai, telah melemahkan kelas menengah tradisional dan mendorong jatuh kelompok itu ke dalam strata sosial ekonomi rendah.

Reformasi keuangan tahun 1980 dan 1990 menekan lebih dalam kelas menengah lama yang lebih tua dan memperluas “patahan” antara berbagai subdivisi. Kemudian, terjadi pula pergeseran kebijakan ekonomi tahun 2000 yang sangat menyakitkan bagi kelompok yang sudah sulit dan terke-pung itu

Neoliberalisme 1990-AN oleh negara secara bertahap, yang mendorong negara mengurangi peran dan fungsinya di bidang ekonomi (awalnya dengan cara mengambangkan mata uang pound Mesir, yang mengakibatkan inflasi, kemudian

melalui program privatisasi yang dipercepat, termasuk swastanisasi aset strategis negara, dan akhirnya dengan memberikan pengambilan keputusan ekonomi kepada kekuatan kapitalis swasta terkemuka), makin membuat kelas menengah tradisional kian terkoyak. Ini semua membuat jurang dan kesenjangan dalam kalangan kelas menengah Mesir, yang menimbulkan ketegangan sosial, serta membuat banyak segmen sosial teralienasi, dan kemarahan masyarakat, terutama kaum muda, makin meledak.

Faktor kedua adalah erosi bertahap atas legitimasi rezim. Nasser (berkuasa melalui kudeta 1952-1970), Sadat (1970-1981), dan Mubarak (1981 -2011), kesemuanya berkuasa atas dasar persetujuan masyarakat atas kerangka kekuasaan menyusul kudeta 1952. Meski semua elite rezim memerintah Mesir berdasarkan persetujuan rakyat untuk berkuasa, dalam praktiknya tidak ada pemilu benar-benar adil dan transparan berlangsung di Mesir selama enam puluh tahun terakhir sebelum revolusi 25 Januari 2011.

Persetujuan rakyat terhadap rezim adalah skematis, dengan referensi tetap pada doktrin dan prinsip kunci revolusi/kudeta 1952 – dimana negara “berpihak pada kelas pekerja”. Namun kebijakan ekonomi rezim pertengahan 1970-AN melepaskan doktrin dan prinsip ini, bahkan para elite penguasa menyatukan kekuatan dan kekayaan pada tahun 2000-AN yang menyebabkan legitimasi mereka kering dan tergerus.

Toleransi masyarakat Mesir atas demokrasi (akibat tidak memiliki partisipasi nyata dalam kekuasaan atau dalam hal fungsi saling control dan imbang), dan toleransi mereka atas absolutisme (dari Nasser Sadat untuk Mubarak) memungkinkannya kekuasaan tertinggi oleh militer yang dipimpin, dijamin, dan dipertahankan oleh rezim 1952. Namun hal ini mulai berubah pada tahun 2000 dengan kekuasaan kaum kapitalis baru: asumsi kontrol penuh atas strategi ekonomi negara dan prakteknya, telah menciptakan keseimbangan intra-rezim antara kemapanan lembaga militer di satu sisi dan munculnya para pelaku ekonomi. Formasi yang terdistorsi ini, yang mana elemen baru memiliki kekuatan keuangan mereka untuk memperkuat posisi mereka sendiri, mewakili kelas menengah yang terdegradasi dan memburuk dalam suasana “kontrak sosial” yang sudah sangat tegang.

Faktor ketiga adalah melemahnya institusi-institusi rezim militer. Hal ini terutama terjadi pada lembaga presiden itu sendiri. Di bawah Nasser dan Sadat, lembaga kepresidenan tetap menjadi pusat urat saraf yang dinamis di pemerintahan, bahkan menjadi laboratorium ide (meskipun bebe-rapa ide yang buruk), dan tentu saja menjadi tempat di mana daya aktif terkandung dan diungkapkan. Tapi pada tahun 2000-AN lembaga kepresidenan layu menjadi struktur administratif belaka di sekitar presiden.

Kemudian apa yang terjadi di Mesir adalah bahwa parlemen tidak demokratis, pemerintah, dan presiden menjadi representasi beragam kehendak presiden semata di mana badan eksekutif ini tidak atau, bukan lagi pilar bagi sistem politik yang fungsional. Peluruhan yang sama terjadap pada sebagian besar lembaga negara lainnya, dari departemen pemerintahan sampai sektor publik. Struktur kelembagaan rezim Mubarak telah mencapai titik terlemah sejak 1952.

Faktor keempat, memburuknya lembaga-lembaga negara itu kian berlipatganda, dan makin kronis selama lebih dari tiga dekade terakhir. Kegagalan neoliberalisme Mesir pada paruh pertama abad KE-20, dan jatuhnya nasionalisme Arab serta mimpi Nasser yang dikembangkan sejak tahun 1960, meninggalkan situasi bagi para penerus Nasser suntuik terus memfokuskan usaha mereka pada “pembangunan”:

suatu gagasan yang kabur dari awal sebab hanya dipahami dalam terma ekonomi, di mana perencanaan lima tahun terus mengalami dilusi baik menyangkut target keuangan, tonggak perekonomian dan ukuran statistik, yang menampakkan tidak adanya ide-ide besar yang mendasar.

Faktor kelima, adalah demografi. Penduduk Mesir meningkat hampir dua kali lipat selama 1980-2010, dari sekitar 45 juta pada 1980 menjadi lebih dari 80 juta pada 2010. Lebih dari 45 juta di antaranya berusia di bawah 35 tahun, dan 40 persen di antara mereka tidak berpendidikan yang cukup, atau bahkan sebagian masih buta huruf.

Kaum muda Mesir mengalami deprivasi berlapis-lapis: secara ekonomi, psikologis (dalam arti bahwa mereka dengan sakit hati dipaksa menyaksikan meningkatnya pengaruh elit ultra-kaya dalam lingkungan politik-ekonomi yang teramat korup), dan emosional (dalam arti bahwa mereka hidup di tengah kekosongan sosial-politik, ditandai dengan perasaan alienasi dan terbuang, suatu keterputusan antara rezim dan orang-orang muda, yang dipenuhi dengan atmosfer suasana lesu dan kegagalan).

Transisi dan Pahit Getirnya

Mesir sekarang dalam transisi limbung. Letusan Januari-Februari 2011 telah terlalu kuat untuk dikelola dalam struktur politik yang ada, dan tidak cukup kuat untuk memaksa penghapusan rezim seluruhnya.

Pada tahap selanjutnya, empat realitas muncul dari „gempa bumi“ politik:

Pertama, telah menjadi ledakan politik daripada letusan ekonomi: tuntutan jutaan orang muda Mesir yang protes di Tahrir Square dan tempat lain di Mesir, tidak tentang sub-sidi atau gaji yang lebih tinggi, tetapi memotong ke jantung kerangka politik negara.

Kedua, fiksasi pada kebuntuan politik mengenai apakah Pre-siden Mubarak mengundurkan diri atau tidak pada akhir masa jabatannya bulan September 2011 lalu, menunjukkan kenyataan bahwa rezim Mesir bukan hanya presiden. Sekarang para kapitalis baru yang saling berperan dan berbagi kekuasaan dalam dekade terakhir telah keluar dan sedang dituntut pengadilan, namun kekuatan inti rezim - yakni golongan militer - telah memperoleh kembali kontrol semula.

Tokoh kunci muncul sebagai kapten politik di masa transisi ini, dihormati sebagai individu, beberapa bahkan mengko-mando kepemimpinan yang luas, sebagian karena mereka mampu memicu ketakutan kelas menengah akan timbulnya kekacauan lanjutan dan memicu kesadaran kelas menengah ini bahwa tentara adalah satu-satunya kekuatan dalam Mesir yang mampu menjamin stabilitas dan menjaga ketertiban. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa rezim sekarang yang dikendalikan dan dikuasai oleh militer, lebih kuat daripada rezim Mubarak PRA-25 Januari 2011.

Ketiga, Islam politik telah mencapai keuntungan strategis. Memang benar bahwa orang-orang muda yang menjadi katalis pemberontakan dan revolusi Nil, dengan memakai retorika nasionalis dan sekuler. Di sini. Ikhwanul Muslimin tidak menjadi kekuatan inisiatif dan tidak pula menjadi inspirasi demonstrasi serta tidak memimpin pasukan oposisi pada sepanjang tahap gerakan revolusi Tahrir Square, namun aktivis Ikhwanul jelas ambil bagian meski baru belakangan dan tidak menggunakan slogan Islam karena takut revolusi ini akan ditumpas militer dengan dukungan luas dari AS/Barat.

Tapi Ikhwan melakukan negosiasi dengan wakil presiden sebagai entitas yang harus diakui (secara politik, jika belum secara legal). Ikhwanul Muslimin juga melakukan dialog

terbuka dengan Mohamed El-Baradei, tokoh liberal yang paling penting sebagai lawan rezim. Dan yang terpenting, setelah Ikhwanul lebih dari enam puluh tahun intens (dan hampir kontinyu) berkonfrontasi dengan rezim sekuler, Ikhwan telah mengubah sikap itu dan malah bergabung dengan arus demokrasi sekuler.

Benar, Ikhwan telah berjanji tidak akan mencalonkan presiden dalam pemilihan presiden bulan September 2011, tetapi juga mengisyaratkan bahwa ia mungkin hanya meraih suara sepertiga kursi di parlemen. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Ikhwanul yang selama delapan puluh dua tahun bermusuhan dengan pemerintah, telah memperoleh kepercayaan diri, dan bahwa banyak di antara generasi muda Ikhwanul melihat kesempatan bersejarah untuk bergerak lebih dekat ke arah kekuasaan.

Keempat, gerakan liberal Mesir juga menjadi pemenang mes-ki mereka akan tetap terpecah-pecah, retak, dan tanpa pemimpin, seperti fakta gerakan mereka sebelum tanggal 25 Januari 2011. Partai-partai liberal di negara itu tersaruk dalam permainan situasi yang berubah dengan cepat. Momentum yang diciptakan tetap dipersonifikasikan pada munculnya Mohamed El- Baradei.

Sebagai struktur kelas menengah, tidak bisa disangkal bahwa gerakan liberal ini mampu mendorong pengelompokan politik sebagai kekuatan yang gagasan dan kehadirannya memandu pemberontakan dan revolusi pemuda di Kairo. Hal ini telah menciptakan modal politik yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk menciptakan pembaruan.

Bagaimanakah kelak realitas ini akan bermain dalam beberapa bulan mendatang? Secara politik, Mesir akan memasuki fase persaingan untuk saling berebut pengaruh dan dukungan antara para pemimpin baru dari peran militer, Islam politik yang diwakili oleh Ikhwanul Muslimin, dan kaum liberal Mesir. Semua ini akan menjadi pergulatan dan duel politik dalam jangka menengah.

Militer memiliki kekuatan pengendalian, disiplin, pegang kekuasaan dan menampilkan diri sebagai pelindung rakyat, penjamin stabilitas, dan menjadi pendiri rezim yang memerintah Mesir dari 1952. Sementara Ikhwanul, didukung oleh infrastruktur politik sosial-ekonom yang luas, ditopang oleh kekuatan yang diorganisasi secara luar biasa, dan terhubung ke kekuatan agama yang konservatif dari masyarakat Mesir sejak 1980-AN, akan berusaha hadir dalam warna baru - mereka merujuk pada contoh sukses dan menarik dari Partai AK pimpinan Erdogan di Turki.

Sedangkan kaum liberal, jika kredibel, maka akan memiliki kepemimpinan modern yang muncul dari dalam barisan mereka, juga bisa mendapatkan keuntungan dari kontes politik pasca Mubarak ini. Hal ini pada gilirannya akan tergantung pada kemampuan mereka untuk membangun momentum revolusi NII, sebagian dengan cara menerapkan eksperimen liberal di Mesir sebagaimana yang dimulai pada paruh pertama abad KE-20, di mana banyak kelas menengah Mesir yang merasa dilibatkan dan ambil bagian.

Tapi ada juga kesempatan yang lebih besar, di mana jutaan orang di seluruh negara menjunjung peristiwa inspiratif dari Tahrir Square dan memiliki suara menentukan dalam drama politik ke depan. Air bah politik Mesir telah mandek untuk waktu yang lama. "Tanah coklat, abadi coklat" sedang ber- siap menghadapi banjir lebih lanjut dari energi politik rakyat Mesir dan ke mana semua itu akan membawa rakyat Mesir, tidak ada yang tahu. Tapi sesuatu telah berubah. Ini adalah saat yang tepat untuk menjadi seorang Mesir dalam arti sesungguhnya.

Kemunduran AS di Timur Tengah

Pasca Arab Spring, ada gejala bahwa pengaruh Amerika Serikat di bawah Presiden Barack Obama di Timur Tengah mengalami kemunduran serius seiring dengan kemerosotan ekonominya. Sementara kemenangan para Islamis dalam pemilu pasca Arab Spring di Timur Tengah (Mesir, Tunisia, Maroko, dan akan disusul Libya, Yaman dan seterusnya) telah mencemaskan Israel, sekutu utama Amerika Serikat di kawasan itu. 9

Memang, sebagaimana diungkapkan Profesor John Esposito dari Georgetown University, dalam lawatan ke Cairo Mesir beberapa tahun lalu, Presiden Obama berpidato simpatik terhadap Dunia Islam di mana ia menyerukan kemitraan AS dan Islam berdasarkan prinsip saling menghormati. Bahkan Obama menyatakan AS akan memerangi stereotipe negatif mengenai Islam dimanapun hal itu muncul. Obama juga menunjukkan empati atas perjuangan Palestina, empati atas status Yerusalem yang menjadi salah satu kota suci Islam (Kristen dan Yahudi), yang terus menjadi hambatan berat dalam negosiasi Israel-Palestina. Obama mampu menghapus kesan dan persepsi Dunia Muslim bahwa perang global AS melawan terorisme yang dilancarkan pendahulunya, George Bush, bukan merupakan perang melawan Islam dan Muslim. Di bawah Bush ada kesan kuat di kalangan Muslim di Timur Tengah bahwa kebijakan luar negeri era Bush sangat dipengaruhi fundamentalisme Kristen. Arah kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, di mata Muslim menunjukkan arah yang lebih jelas di era Obama yakni mengutamakan dialog dan perdamaian, bukan perang dan kekerasan seperti halnya era Bush atas nama nasionalisme Amerika dan klaim kepentingan perdamaian dunia.

Para akademisi dan analis politik Amerika mengamati kiprah AS di Dunia Islam cenderung menurun. Para akademisi dan pengamat menilai, kebijakan Presiden Barack Obama di Timur Tengah makin lemah, bahkan kehadiran AS di kawasan itu dirasakan kian “surut dan mengambang”, sementara pengaruh Iran dan Turki di Timur Tengah kian menguat. “Itu kenyataan politik yang terjadi, di mana Iran dan Turki kini bersaing dengan Arab Saudi untuk hadir dan berebut peran di kawasan pasca Arab Spring,” kata Prof. Fouad Ajami, pakar Timur Tengah dari Johns Hopkins University yang kini mengajar di Stanford.

Dalam kaitan ini, menyusul jatuhnya Moammar Khadafy di Libya, sejumlah rudal anti serangan udara dan rudal anti-tank dilaporkan Mosad (agen Israel) jatuh ke tangan Hamas dan Muslim radikal di Palestina, dan ini menjadi kecemasan tersendiri bagi Israel, karena jarak tembak rudal itu mampu menjangkau dengan mudah wilayah-wilayah Israel.

Sikap AS yang mengorbankan Hosni Mubarak di Mesir dan Ben Ali di Tunisia dalam Arab Spring, menjadi cermin para pemimpin Arab bahwa AS tidak segan-segan mengorbankan para sekutu dan loyalis paling setianya. Sehingga mereka menoleh perhatian kepada Iran dan Turki yang berambisi memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah pasca Arab Spring.

“Dunia Arab tak sepenuhnya percaya pada AS sebab berbagai pengalaman sejarah menimbulkan kenyataan seperti itu,” ungkap Profesor emeritus, Hamid Algar di Universitas California Berkeley.

“Pasca jatuhnya Khadafy, sejumlah rudal strategis Libya beralih ke tangan HAMAS dan Islamis radikal di Palestina, ditambah kemunduran AS di kawasan Timteng, membuat Israel cemas dan meningkatkan anggaran pertahanannya,” ungkap Profesor Efraim Inbar, seorang pengamat Timur Tengah.

Penarikan mundur AS dari Irak dan Afghanistan juga dilihat Dunia Arab sebagai kemunduran Washington untuk bertahan di kawasan itu, dan membuka peluang bagi Iran dan Turki serta Rusia dan China untuk meningkatkan kehadiran mereka di kawasan itu. Hal ini meningkatkan kekhawatiran Israel, negeri zionis yang terus berkonflik dengan Arab.

Israel sendiri sudah meningkatkan pertahanannya menyusul jatuhnya para diktator Arab sekutu AS dalam Arab Spring, karena khawatir para elite dan penguasa baru di Timur Tengah adalah para Islamis yang cenderung anti- Yahudi atau menentang Israel. Arab Spring sudah mengirimkan dering peringatan yang nyaring bagi Israel bahwa bulan madu AS dan sekutu Arabnya seperti Mesir, Yaman, Tunisia dan lainnya, sudah berlalu, dan ancaman baru mengintai Israel di tengah melemahnya kehadiran AS di kawasan itu.

Salah satu masalah serius di mata AS dan Israel adalah Iran yang membangun kekuatan nuklir untuk tujuan damai. Israel termasuk yang khawatir atas nuklir Teheran ini. Namun Presiden AS Barack Obama, Maret (4/3/2012), mengatakan, “pembicaraan terlalu dini tentang perang” dengan Iran. Obama meminta kesabaran dalam mengakhiri pertikaian nuklir Iran karena, tekanan internasional yang berkelanjutan dapat berfungsi untuk menekan Iran.

Obama tak berani menekan Iran sendirian karena ekonomi AS merosot akibat “era gemar perang” periode Presiden George W. Bush dan skandal finansial Subprime Mortgage, Lehman Brothers dan seterusnya, yang menguras keuangan AS .

Mengenai Iran, Simon Peres merupakan salah satu elite Is-rael yang menyebut Iran sebagai "rezim yang jahat, kejam, dan korup secara moral" yang bertekad mengendalikan Timur Tengah. "Iran adalah pusat, sponsor, penyokong keuangan teror global. Iran merupakan sebuah bahaya bagi seluruh dunia," kata Peres.

Iran selama ini menegaskan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan energi sipil dan penelitian medis. Dalam hal ini, Intelijen AS yakin bahwa Iran saat ini tidak berniat untuk memproduksi senjata nuklir, meskipun negara itu mungkin sedang mengupayakan kapasitas untuk melakukan hal itu, dan Washington telah menekankan pentingnya sanksi yang membuat jera dan diplomasi. Namun Israel dilaporkan ingin bergerak lebih cepat dan tegas terhadap kegiatan nuklir Iran, dengan menggunakan serangan militer guna mencegah negara itu bahkan untuk mendapatkan kapasitas sebelum memutuskan akan memproduksi senjata nuklir. Agen Israel, Mosad, sudah membunuh beberapa ahli nuklir Iran dalam beberapa tahun ini.

Dalam hal ini, Obama sudah menyatakan, “Para pemimpin Iran harus tahu bahwa saya tidak punya kebijakan untuk memaksakan negosiasi secara damai (containment), saya punya kebijakan untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Dan seperti yang sudah pernah tegaskan, saya tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan militer jika itu perlu guna membela Amerika Serikat dan kepentingannya.”

Presiden AS Barack Obama menghadapi kesulitan dalam negeri dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dan politiknya. Kebijakan Politik Presiden Obama yang sering bertentangan dengan kelompok elite yang mengontrol Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat menjalankan program dan janji-janji politiknya untuk memulihkan perekonomian AS yang mengalami krisis.

Obama juga terperangkap dengan kebijakan perang yang merupakan tanggung jawab Presiden sebelumnya yaitu Presiden Bush. Perang Afganistan, dan Irak membutuhkan biaya besar yang seharusnya dapat digunakan untuk memulihkan perekonomian Amerika Serikat.

Situasi ini membuat kebijakan Obama di Timur Tengah pasca Arab Spring masih diwarnai ketidakpastian

Dilema AS di Timur Tengah Pasca Arab Spring

AS menghadapi dilema di Timur Tengah pasca Arab Spring. Sejak awal para demonstran yang menggerakkan Arab Spring bukanlah para Islamis, melainkan kaum muda yang prodemokrasi, liberal dan sekuler, namun ketika pemilu pasca Arab Spring digelar, ternyata yang menang mutlak justru kaum Islamis. Bagaimanakah AS harus menanggapi realitas politik ini?

Dilema itulah salah satu tema dalam perdebatan kaum akademis di AS mengenai implikasi Arab Spring dalam kebijakan luar negeri AS. Hampir tak bisa dielakkan bahwa para aktivis pelopor demokrasi dan revolusi Arab Spring kalah telak di dalam pemilu Mesir, Maroko, Tunisia dan akan menyusul negeri Arab lainnya seperti Yaman dan Libya, di mana para Islamis seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi memiliki akar rumput sosial (grassroot) yang kuat.

Prof Bassam Tibi, guru besar tamu di Stanford University, AS, melihat AS di bawah Obama tampak gamang dan bingung ketika harus menghadapi kenyataan bahwa Kaum Islamis yang memenangkan pemilu di Timur Tengah. Seperti diketahui, Ikhwanul Muslimin dan An-Nour (Salafi) menang dalam pemilu Mesir, Partai An-Nahda di Tunisia juga menang, demikian halnya kaum Islamis di Maroko. Kelompok nasional sekuler dan liberal demokrat sangat tersudut, kalah telak dalam pemilu itu. Tak mengherankan di hampir semua universitas dan lembaga studi bidang Internasional, Islam dan Keamanan, menggelar seminar, riset dan konferensi mengenai Arab Spring yang masih dicermati ke manakah arah sosial-politiknya ke depan, sebab Arab Spring telah mematahkan "pakem diplomasi" AS di Dunia Arab yang sudah berjalan beberapa generasi.

"AS harus bisa membangun hubungan dengan elemen-elemen Civil Islam (Muslim pluralis dan modern) di Timur Tengah secara lebih intensif dan kuat ketimbang dengan para Islamis yang punya agenda tersembunyi membangun Islamisme dan menegakkan Syariah. Dalam jangka panjang, AS/Barat juga harus bisa meyakinkan kaum Islamis agar tidak berkubang pada orientasi Islamisme yang menjebak mereka menjadi para Islamis radikal maupun moderat, sebab Islamisme itu bertentangan dengan demokrasi yang menghargai pluralisme, hak individu, sekulerisme dan HAM," ungkap Prof Bassam Tibi, seorang Muslim dari Jerman.

Kesulitan ekonomi AS jelas membatasi ruang gerak Obama dalam menyikapi perkembangan Timur Tengah dewasa ini. Ini serba dilematis dan menyusahkan AS sendiri yang ingin hadir di Timur Tengah dengan kesulitan ekonomi di dalam negeri yang membatasi ruang geraknya kini.

Penarikan mundur AS dari Irak dan Afghanistan juga dilihat Dunia Arab sebagai kemunduran AS yang tak bisa dielakkan lagi akibat kemerosotan ekonominya.

Di luar kendali Obama, pada satu sisi, kebangkitan politik Timur-Tengah dengan Arab Spring memunculkan harapan baru bagi masyarakat Timur-Tengah untuk dapat menikmati potensi sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Pada sisi lain, Arab Spring juga memberikan pengaruh yang signifikan pada pergeseran peta kekuatan politik dan pertahanan di kawasan Timur-Tengah.

Dalam kaitan ini, ketidakmampuan Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel akibat dilumpuhkan oleh kebangkrutan ekonominya, jelas membuat Israel terisolasi di kawasan tersebut. Ingat bahwa Israel adalah AS dan AS adalah Israel, dua sisi dari satu keping mata uang yang sama. Mengingat demokrasi yang muncul dari Arab Spring boleh jadi akan menyalurkan kemarahan masyarakat Arab terhadap Israel selama puluhan tahun yang berhasil diredam oleh tiran-tiran mereka.

Kesimpulan

Para akademisi dan analis internasional mencermati lebih mendalam, bahwa efek dari kondisi ekonomi yang memburuk di Eropa dan Amerika Serikat boleh jadi memberikan pengaruh signifikan bukan hanya pada dimensi (sektor) ekonomi tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, khususnya politik, keamanan, sosial dan budaya Timur Tengah dan Dunia Islam pada umumnya.

Kebangkrutan ekonomi yang menghantui Eropa dan AS tentu akan menyita perhatian pemimpin negara-negara maju itu. Ada kekhawatiran perhatian dominan AS ke masalah ekonomi domestik membuat perhatian mereka pada percaturan politik, keamanan, sosial dan budaya menjadi minim. Hal ini, bagi Timur Tengah, diperkirakan akan membuat kekosongan pengendalian atas arah perjalanan sektor non-ekonomi dunia.

Padahal di sektor ekonomi sendiri, kekosongan pengendalian arah ekonomi dunia juga dapat saja terjadi mengingat negara-negara maju juga cenderung lebih fokus perhatiannya pada kepentingan domestik ekonomi mereka. Tendensi ke arah itu sudah terlihat dari dinamika Uni Eropa (Euro-pean Union-EU) yang kerap gagal mengambil kesepakatan bersama untuk tindakan bersama atas kondisi krisis yang mengancam mereka. Sikap saling curiga dan perbedaan pendapat dari pertemuan EU diperkirakan merefleksikan sikap individualis masing-masing pemimpin Eropa yang cenderung memproteksi kepentingan ekonomi domestik mereka.

Dengan melihat kompleksitas masalah ini, relasi AS dan Timur Tengah masih mengalami tarik ulur, dalam arti yang sudah pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Seberapa besar bantuan AS ke Timur Tengah pasca Rab Spring, misalnya, seperti untuk Mesir, Tunisia dan sebagainya, dan apakah rezim baru Mesir dimana para Islamis berperan kuasa, bersedia menerimanya dengan syarat yang ditentukan Washington?

Masih mungkin terjadi tarik ulur dan tanda tanya. Itulah dampak perubahan di Timur Tengah, yang tidak mudah diraba dalam waktu dekat sebab politik tidak selalu bulat. ***

Bibliografi

- Ahluwalia, "Kemunduran AS di Timur Tengah", www.inilah.com, 19 Maret 2011.
- Dilip Hiro, "The Essential Middle East: A Comprehensive Guide," Yale Global, 12/3/ 2012.
- Dilip Hiro, *After the Empire: The Birth of a Multipolar World* (Yale Center for Study of Globalization, Yale University, 2010).
- Joel Beinin, "A Historical Perspective on the Popular Uprising in Egypt", paper, School of Humanities, Stanford University, 3 Maret 2011.
- Joel Beinin, "Where Does Democracy Come From? Popular Uprising and Parliamentary Elections in Egypt", paper, untuk conference, Henry M Jackson School of International Studies, University of Washington, 5 Maret 2011.
- Lisa Anderson, "Demystifying Arab Spring", *Foreign Affairs*, edisi Mei-Juni 2011.

Smith Alhadar, “Arab Spring dan Implikasinya di Dunia”, makalah, disampaikan dalam Seminar Reformasi Politik Timur Tengah dan Masa Depan Umat Islam, diselenggarakan oleh Universitas Islam As– Syafiiyah (15 Februari 2012).

Tarek Osman, “Egypt: after revolt, transition”, *Opendemocracy*, 9 February 2011. Tarek Osman, *Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak* (Yale University Press, 2010).